

**NOTULENSI**  
**PERSIDANGAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (MUSRENBANGNAS) TAHUN 2024**

**PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

**1. PETUGAS PERSIDANGAN**

Desk : 1  
 Provinsi : Kalimantan Timur  
 Pimpinan Sidang 1 : Mohammad Roudo, ST, MPP, Ph.D  
 Pimpinan Sidang 2 : Priyanto Rohmattullah, SE, MA  
 Notulis Aplikasi : Anom Cahyo Galih Pranoto  
 Notulis Offline: Rafdi Fadhli  
 Pembahas :

Pemerintah Daerah	Kementerian/Lembaga	Direktorat Sektor Bappenas
1. Bappeda Provinsi Kalimantan Timur	1. Kementerian Pertanian	1. Direktorat Ketenagalistrikan, Telekomunikasi dan Informatika
2. Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur	2. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	2. Direktorat Kesehatan dan Gizi Masyarakat
3. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Timur	3. Kementerian Perhubungan	3. Direktorat Sumber Daya Energi, Mineral dan Pertambangan
4. Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur	4. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	4. Direktorat Pangan dan Pertanian
5. Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur	5. Kementerian Kesehatan	5. Direktorat Perumahan dan Kawasan Permukiman
6. Dinas Pertanian Provinsi Kalimantan Timur	6. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	6. Direktorat Sumber Daya Air
7. Bappedalitbang Kota Balikpapan	7. Kementerian Komunikasi dan Informatika	7. Direktorat Transportasi

**NOTULENSI**  
**PERSIDANGAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (MUSRENBANGNAS) TAHUN 2024**

**PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

**2. KESEPAKATAN DAN CATATAN PERSIDANGAN**

No	Usulan	Volume		Satuan	Lokasi Kab/Kota	Kementerian/Lembaga	Hasil Kesepakatan		
		Usulan	Kesepakatan						
1	01 Preservasi Jalan Sp.3 Sambera - Santan - Sp.3 Bontang	13	13	km	Kab. Kutai Kartanegara, Kab. Kutai Timur, Kota Bontang	Kementerian PUPR	Diakomodir		
		<b>Agenda Pembangunan</b>		<b>Sasaran Visi</b>		<b>Arah Pembangunan Nasional</b>			
		02 - Transformasi Ekonomi		01 - Pendapatan Per Kapita Setara Negara Maju		11 - Stabilitas Ekonomi Makro			
		<b>Program</b>	<b>Kegiatan</b>	<b>KRO</b>		<b>RO</b>			
		Program Penanaman Modal	Promosi Wilayah Amerika dan Eropa	Promosi		Pemasaran Investasi Berdasarkan Sektor Pendukung Prioritas Nasional di Wilayah Amerika dan Eropa			
		<b>Catatan dan Tanggapan</b>							
		<b>Pemerintah Daerah</b>		<b>Kementerian Lembaga</b>				<b>Direktorat Sektor Bappenas</b>	

**NOTULENSI**  
**PERSIDANGAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (MUSRENBANGNAS) TAHUN 2024**

**PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

		<p>Bappeda Kaltim:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengalaman Balikpapan-Samarinda sepakat melalui KPBU, bercermin dari pengalaman tersebut, Pemerintah Daerah membebaskan lahan, sebagian membangun konstruksi</li> <li>- Pemprov Kaltim kurang lebih menganggarkan 3 Triliun</li> <li>- Pembangunan jalan Samarinda-Bontang jika melalui APBN tidak mungkin (akan ada intervensi dari Pemda) sehingga bersama-sama menyiapkan</li> <li>- Bina Marga sebelum covid sudah menyiapkan untuk pembangunan Jalan Tol Samarinda-Bontang</li> <li>- Studi kelayakan sudah ada, sudah dipetakan di dalamnya mana yang KPBU mana yang swasta</li> <li>- Pendanaan akan dilakukan koordinasi antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah</li> <li>- Akan dipersiapkan RC-nya</li> </ul>	<p>Kementerian PUPR, BPIW:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Telah disampaikan 5 program preservasi sudah dibahas di Konreg</li> </ul>	<p>Dit. Transportasi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Usulan 1 dan 2 merupakan satu koridor</li> <li>- Status Jalan Nasional, merupakan koridor jalur logistik</li> <li>- Sepakat untuk direkomendasikan usulan 3</li> <li>- Sisi Muara-Kelay sudah masuk indikasi SBSN 2025</li> <li>- Bisa dilanjutkan juga dengan rupiah murni</li> <li>- Usulan 4 status Jalan Nasional, merupakan 1 koridor penghubung dari Tenggarong Timur ke Blusuh</li> <li>- Strategis untuk mendukung IKN</li> <li>- Untuk mendukung kemantapan jalan direkomendasikan usulan 5 (Muara Muntai) – direkomendasikan, secara strategis mendukung konektivitas IKN</li> <li>- Preservasi jalan perlu diprogramkan usulan 9 (Samarinda-Bontang)</li> </ul>			
No	Usulan	Volume		Satuan	Lokasi Kab/Kota	Kementerian/Lembaga	Hasil Kesepakatan
		Usulan	Kesepakatan				
2	02 Preservasi Jalan Sp. 3 Bontang -	20,9	20,9	km	Kab. Kutai Timur, Kota Bontang	Kementerian PUPR	Diakomodir
		<b>Agenda Pembangunan</b>		<b>Sasaran Visi</b>		<b>Arah Pembangunan Nasional</b>	

**NOTULENSI**  
**PERSIDANGAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (MUSRENBANGNAS) TAHUN 2024**

**PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

Sanggatta - Sp. Perda	02 - Transformasi Ekonomi		01 - Pendapatan Per Kapita Setara Negara Maju	11 - Stabilitas Ekonomi Makro	
	<b>Program</b>	<b>Kegiatan</b>		<b>KRO</b>	<b>RO</b>
	Program Infrastruktur Konektivitas	Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional		Prasarana Bidang Konektivitas Darat (Jalan)	Dukungan Infrastruktur IKN
	<b>Catatan dan Tanggapan</b>				
	<b>Pemerintah Daerah</b>		<b>Kementerian Lembaga</b>		<b>Direktorat Sektor Bappenas</b>
	<p>Bappeda Kaltim:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengalaman Balikpapan-Samarinda sepakat melalui KPBU, bercermin dari pengalaman tersebut, Pemerintah Daerah membebaskan lahan, sebagian membangun konstruksi</li> <li>- Pemprov Kaltim kurang lebih menganggarkan 3 Triliun</li> <li>- Pembangunan jalan Samarinda-Bontang jika melalui APBN tidak mungkin (akan ada intervensi dari Pemda) sehingga bersama-sama menyiapkan</li> <li>- Bina Marga sebelum covid sudah menyiapkan untuk pembangunan Jalan Tol Samarinda-Bontang</li> <li>- Studi kelayakan sudah ada, sudah dipetakan di dalamnya mana yang KPBU mana yang swasta</li> </ul>		<p>Kementerian PUPR, BPIW:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Telah disampaikan 5 program preservasi sudah dibahas di Konreg</li> </ul>		<p>Dit. Transportasi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Usulan 1 dan 2 merupakan satu koridor</li> <li>- Status Jalan Nasional, merupakan koridor jalur logistik</li> <li>- Sepakat untuk direkomendasikan usulan 3</li> <li>- Sisi Muara-Kelay sudah masuk indikasi SBSN 2025</li> <li>- Bisa dilanjutkan juga dengan rupiah murni</li> <li>- Usulan 4 status Jalan Nasional, merupakan 1 koridor penghubung dari Tenggarong Timur ke Blusuh</li> <li>- Strategis untuk mendukung IKN</li> <li>- Untuk mendukung kemandirian jalan direkomendasikan usulan 5 (Muara Muntai) – direkomendasikan, secara strategis mendukung konektivitas IKN</li> </ul>

**NOTULENSI**  
**PERSIDANGAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (MUSRENBANGNAS) TAHUN 2024**

**PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

		- Pendanaan akan dilakukan koordinasi antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Akan dipersiapkan RC-nya				- Preservasi jalan perlu diprogramkan usulan 9 (Samarinda-Bontang)			
No	Usulan	Volume		Satuan	Lokasi Kab/Kota	Kementerian/Lembaga	Hasil Kesepakatan		
		Usulan	Kesepakatan						
3	03 - Preservasi Jalan Bts. Kutai Timur - Kelay - Labanan	25,73	25,73	km	Kab. Kutai Timur, Kab. Berau	Kementerian PUPR	Diakomodir		
		Agenda Pembangunan		Sasaran Visi		Arah Pembangunan Nasional			
		02 - Transformasi Ekonomi		01 - Pendapatan Per Kapita Setara Negara Maju		11 - Stabilitas Ekonomi Makro			
		Program	Kegiatan	KRO		RO			
		Program Infrastruktur Konektivitas	Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional	Prasarana Bidang Konektivitas Darat (Jalan)		Dukungan Infrastruktur IKN			
		Catatan dan Tanggapan							
		Pemerintah Daerah		Kementerian Lembaga		Direktorat Sektor Bappenas			
		Bappeda Kaltim: - Pengalaman Balikpapan-Samarinda sepakat melalui KPBU, bercermin dari pengalaman tersebut, Pemerintah Daerah membebaskan lahan, sebagian membangun konstruksi		Kementerian PUPR, BPIW: - Telah disampaikan 5 program preservasi sudah dibahas di Konreg		Dit. Transportasi: - Usulan 1 dan 2 merupakan satu koridor - Status Jalan Nasional, merupakan koridor jalur logistik - Sepakat untuk direkomendasikan usulan 3			

**NOTULENSI**  
**PERSIDANGAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (MUSRENBANGNAS) TAHUN 2024**

**PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemprov Kaltim kurang lebih menganggarkan 3 Triliun</li> <li>- Pembangunan jalan Samarinda-Bontang jika melalui APBN tidak mungkin (akan ada intervensi dari Pemda) sehingga bersama-sama menyiapkan</li> <li>- Bina Marga sebelum covid sudah menyiapkan untuk pembangunan Jalan Tol Samarinda-Bontang</li> <li>- Studi kelayakan sudah ada, sudah dipetakan di dalamnya mana yang KPBU mana yang swasta</li> <li>- Pendanaan akan dilakukan koordinasi antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah</li> <li>- Akan dipersiapkan RC-nya</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sisi Muara-Kelay sudah masuk indikasi SBSN 2025</li> <li>- Bisa dilanjutkan juga dengan rupiah murni</li> <li>- Usulan 4 status Jalan Nasional, merupakan 1 koridor penghubung dari Tenggarong Timur ke Blusuh</li> <li>- Strategis untuk mendukung IKN</li> <li>- Untuk mendukung kemantapan jalan direkomendasikan usulan 5 (Muara Muntai) – direkomendasikan, secara strategis mendukung konektivitas IKN</li> <li>- Preservasi jalan perlu diprogramkan usulan 9 (Samarinda-Bontang)</li> </ul>				
No	Usulan	Volume		Satuan	Lokasi Kab/Kota	Kementerian/Lembaga	Hasil Kesepakatan	
		Usulan	Kesepakatan					
4	04 - Preservasi Jalan Sp.4 Senoni - Sp.3 Kota Bangun - Muara Leka	31,09	31,09	km	Kab. Kutai Kartanegara	Kementerian PUPR	Diakomodir	
		Agenda Pembangunan		Sasaran Visi		Arah Pembangunan Nasional		
		02 - Transformasi Ekonomi		01 - Pendapatan Per Kapita Setara Negara Maju		11 - Stabilitas Ekonomi Makro		
		Program	Kegiatan	KRO		RO		

**NOTULENSI**  
**PERSIDANGAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (MUSRENBANGNAS) TAHUN 2024**

**PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

		Program Infrastruktur Konektivitas	Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional	Pras arana Bidang Konektivitas Darat (Jalan)	Dukungan Infrastruktur IKN	
<b>Catatan dan Tanggapan</b>						
<b>Pemerintah Daerah</b>		<b>Kementerian Lembaga</b>		<b>Direktorat Sektor Bappenas</b>		
<p>Bappeda Kaltim:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengalaman Balikpapan-Samarinda sepakat melalui KPBU, bercermin dari pengalaman tersebut, Pemerintah Daerah membebaskan lahan, sebagian membangun konstruksi</li> <li>- Pemprov Kaltim kurang lebih menganggarkan 3 Triliun</li> <li>- Pembangunan jalan Samarinda-Bontang jika melalui APBN tidak mungkin (akan ada intervensi dari Pemda) sehingga bersama-sama menyiapkan</li> <li>- Bina Marga sebelum covid sudah menyiapkan untuk pembangunan Jalan Tol Samarinda-Bontang</li> <li>- Studi kelayakan sudah ada, sudah dipetakan di dalamnya mana yang KPBU mana yang swasta</li> <li>- Pendanaan akan dilakukan koordinasi antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah</li> <li>- Akan dipersiapkan RC-nya</li> </ul>		<p>Kementerian PUPR, BPIW:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Telah disampaikan 5 program preservasi sudah dibahas di Konreg</li> </ul>		<p>Dit. Transportasi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Usulan 1 dan 2 merupakan satu koridor</li> <li>- Status Jalan Nasional, merupakan koridor jalur logistik</li> <li>- Sepakat untuk direkomendasikan usulan 3</li> <li>- Sisi Muara-Kelay sudah masuk indikasi SBSN 2025</li> <li>- Bisa dilanjutkan juga dengan rupiah murni</li> <li>- Usulan 4 status Jalan Nasional, merupakan 1 koridor penghubung dari Tenggarong Timur ke Blusuh</li> <li>- Strategis untuk mendukung IKN</li> <li>- Untuk mendukung kemantapan jalan direkomendasikan usulan 5 (Muara Muntai) – direkomendasikan, secara strategis mendukung konektivitas IKN</li> <li>- Preservasi jalan perlu diprogramkan usulan 9 (Samarinda-Bontang)</li> </ul>		

**NOTULENSI**  
**PERSIDANGAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (MUSRENBANGNAS) TAHUN 2024**

**PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

No	Usulan	Volume		Satuan	Lokasi Kab/Kota	Kementerian/Lembaga	Hasil Kesepakatan		
		Usulan	Kesepakatan						
5	05 - Preservasi Jalan Muara Muntai (Bts. Kab. Kukar) - Jempang (Nayan)	23,73	23,73	km	Kab. Kutai Kartanegara	Kementerian PUPR	Diakomodir		
		<b>Agenda Pembangunan</b>		<b>Sasaran Visi</b>		<b>Arah Pembangunan Nasional</b>			
		02 - Transformasi Ekonomi		01 - Pendapatan Per Kapita Setara Negara Maju		11 - Stabilitas Ekonomi Makro			
		<b>Program</b>	<b>Kegiatan</b>	<b>KRO</b>		<b>RO</b>			
		Program Infrastruktur Konektivitas	Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional	Prasarana Bidang Konektivitas Darat (Jalan)		Dukungan Infrastruktur IKN			
		<b>Catatan dan Tanggapan</b>							
		<b>Pemerintah Daerah</b>		<b>Kementerian Lembaga</b>		<b>Direktorat Sektor Bappenas</b>			
		Bappeda Kaltim: - Pengalaman Balikpapan-Samarinda sepakat melalui KPBU, bercermin dari pengalaman tersebut, Pemerintah Daerah membebaskan lahan, sebagian membangun konstruksi - Pemprov Kaltim kurang lebih menganggarkan 3 Triliun - Pembangunan jalan Samarinda-Bontang jika melalui APBN tidak mungkin (akan ada intervensi dari		Kementerian PUPR, BPIW: - Telah disampaikan 5 program preservasi sudah dibahas di Konreg		Dit. Transportasi: - Usulan 1 dan 2 merupakan satu koridor - Status Jalan Nasional, merupakan koridor jalur logistik - Sepakat untuk direkomendasikan usulan 3 - Sisi Muara-Kelay sudah masuk indikasi SBSN 2025 - Bisa dilanjutkan juga dengan rupiah murni			



**BAPPENAS**  
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/  
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

## NOTULENSI

### PERSIDANGAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (MUSRENBANGNAS) TAHUN 2024

#### PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

		<p>Pemda) sehingga bersama-sama menyiapkan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bina Marga sebelum covid sudah menyiapkan untuk pembangunan Jalan Tol Samarinda-Bontang</li> <li>- Studi kelayakan sudah ada, sudah dipetakan di dalamnya mana yang KPBU mana yang swasta</li> <li>- Pendanaan akan dilakukan koordinasi antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah</li> <li>- Akan dipersiapkan RC-nya</li> </ul>			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Usulan 4 status Jalan Nasional, merupakan 1 koridor penghubung dari Tenggarong Timur ke Blusuh</li> <li>- Strategis untuk mendukung IKN</li> <li>- Untuk mendukung kemandirian jalan direkomendasikan usulan 5 (Muara Muntai) – direkomendasikan, secara strategis mendukung konektivitas IKN</li> <li>- Preservasi jalan perlu diprogramkan usulan 9 (Samarinda-Bontang)</li> </ul>				
No	Usulan	Volume		Satuan	Lokasi Kab/Kota	Kementerian/Lembaga	Hasil Kesepakatan		
		Usulan	Kesepakatan						
6	06 Pembangunan Jalan Tering Ujoh Bilang Long Bagun Long Pahangai	40	40	km	Kab. Mahakam Ulu	Kementerian PUPR	<b>Diakomodir</b> Dengan catatan penyesuaian volume		
		<b>Agenda Pembangunan</b>		<b>Sasaran Visi</b>		<b>Arah Pembangunan Nasional</b>			
		02 - Transformasi Ekonomi		02 - Kemiskinan Menuju Nol Persen dan Menurunnya Ketimpangan		11 - Stabilitas Ekonomi Makro			
		<b>Program</b>	<b>Kegiatan</b>	<b>KRO</b>		<b>RO</b>			
		Program Infrastruktur Konektivitas	Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional	Prasarana Bidang Konektivitas Darat (Jalan)		Pembangunan Jalan Trans pada 18 Pulau Tertinggal, Terluar, dan Terdepan (MP)			
		<b>Catatan dan Tanggapan</b>							
		<b>Pemerintah Daerah</b>		<b>Kementerian Lembaga</b>		<b>Direktorat Sektor Bappenas</b>			

**NOTULENSI**  
**PERSIDANGAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (MUSRENBANGNAS) TAHUN 2024**

**PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

		Bappeda Kaltim: - Sependapat dengan BPIW dan Bina Marga	Kementerian PUPR, BPIW: - Ruas ini dalam pembahasan Konreg sudah ada program untuk mendukung Tering-Long Baun (Ruas 6,7,8,9,10 dan 11) - Sudah didukung SBS 2025 - RC-nya sudah siap  Kementerian PUPR, Bina Marga: - Ruas Long Bagun pada Konreg sudah dilakukan pembahasan sebelum SBPI keluar - Untuk yang dapat diakomodir pada tahun 2025 hanya untuk ruas 6,7,8 dan 9 - Total panjang belum dapat dikunci - Pagu SBSN ruas sekitar 88 Miliar		Dit. Transportasi: - Mendukung ruas ini - Long Bagun dan Long Pahangai masuk ke dalam Long Midang			
No	Usulan	Volume		Satuan	Lokasi Kab/Kota	Kementerian/Lembaga	Hasil Kesepakatan	
		Usulan	Kesepakatan					
7	07 - Pengendalian Banjir Kota Balikpapan	1	1	Unit	Kota Balikpapan	Kementerian PUPR	<b>Diakomodir</b> Dengan catatan apabila lahan <i>clean and clear</i> dari Pemerintah Kota Balikpapan paling lambat 8 Mei 2024 ke Ditjen SDA,	
		Agenda Pembangunan		Sasaran Visi		Arah Pembangunan Nasional		
		02 - Transformasi Ekonomi		01 - Pendapatan Per Kapita Setara Negara Maju		17 - Resiliensi Terhadap Bencana dan Perubahan Iklim		
		Program	Kegiatan	KRO		RO		
		Program Ketahanan Sumber Daya Air	Pengendalian Banjir, Lahar, Pengelolaan Drainase Utama	Prasarana Jaringan Sumber Daya Air		Prasarana Pengendali Daya Rusak Air yang Dibangun		

**NOTULENSI**  
**PERSIDANGAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (MUSRENBANGNAS) TAHUN 2024**

**PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

		Perkotaan, dan Pengaman Pantai			Kementerian PUPR
<b>Catatan dan Tanggapan</b>					
		<b>Pemerintah Daerah</b>	<b>Kementerian Lembaga</b>	<b>Direktorat Sektor Bappenas</b>	
		<p>Bappeda Kaltim:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tahun 2021 sudah dialokasikan untuk pembebasan lahan dan jaringan irigasi serta bendung regulatornya</li> <li>- Terdapat lahan sawah 21.000 lahan baku</li> <li>- Produktivitas sawah diharapkan meningkat</li> <li>- Studi apa yang dibutuhkan untuk Sungai Ampal Balikpapan</li> <li>- 7 Ha sudah bebas, 3 Ha akan dibebaskan</li> <li>- Sesuai dengan penlok, sudah bebas semua namun perlu konsinyasi</li> <li>- 3 Ha adalah lahan yang belum diketahui pemiliknya (di BPN disebutkan tanah negara</li> <li>- Posisi berada di luar daerah genangan</li> <li>- 3 Ha akan dikonsinyasikan dengan PU</li> <li>- Tanah negara tidak bisa dibebaskan</li> <li>- Sudah ada FS dan DED dari BWS</li> </ul>	<p>Kementerian PUPR, BPIW:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengendali banjirnya belum diprioritaskan pada tahun 2025</li> <li>- Dokumen teknis di Kota Balikpapan sudah dialokasikan pada tahun 2025</li> </ul> <p>Kementerian PUPR, SDA:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Studi akan dilakukan pada tahun 2025</li> <li>- Kemungkinan akan dibangun pada tahun 2028</li> <li>- Prosesnya masih dalam pembebasan lahan, belum 100% dibebaskan, akan komitmen jika 100% dikerjakan</li> <li>- Dibutuhkan lahan yang <i>clean and clear</i>, secara paralel belum bisa, harus step by step</li> <li>- Ada beberapa titik, prosesnya ada studi di 2025-2027 lokus Sungai Ampal</li> </ul>	<p>Dit. Sumber Daya Air:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sungai Ampal sudah masuk <i>programming</i>, namun penahapannya bukan dari Bendali Hulu, melainkan Bendali Lima</li> </ul>	
<b>No</b>	<b>Usulan</b>	<b>Volume</b>	<b>Satuan</b>	<b>Lokasi Kab/Kota</b>	<b>Kementerian/Lembaga</b>

**NOTULENSI**  
**PERSIDANGAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (MUSRENBANGNAS) TAHUN 2024**

**PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

		Usulan	Kesepakatan				Hasil Kesepakatan		
<b>8</b>	08 Pengendalian Banjir Kota Samarinda	1	1	km	Kota Samarinda	Kementerian PUPR	<b>Diakomodir</b>		
		<b>Agenda Pembangunan</b>		<b>Sasaran Visi</b>		<b>Arah Pembangunan Nasional</b>			
		02 - Transformasi Ekonomi		01 - Pendapatan Per Kapita Setara Negara Maju		17 - Resiliensi Terhadap Bencana dan Perubahan Iklim			
		<b>Program</b>	<b>Kegiatan</b>	<b>KRO</b>		<b>RO</b>			
		Program Ketahanan Sumber Daya Air	Pengendalian Banjir, Lahar, Pengelolaan Drainase Utama Perkotaan, dan Pengaman Pantai	Prasarana Jaringan Sumber Daya Air		Prasarana Pengendali Daya Rusak Air yang Dibangun			
		<b>Catatan dan Tanggapan</b>							
		<b>Pemerintah Daerah</b>		<b>Kementerian Lembaga</b>		<b>Direktorat Sektor Bappenas</b>			
		Bappeda Kaltim: - Tahun 2021 sudah dialokasikan untuk pembebasan lahan dan jaringan irigasi serta bendung regulatornya - Terdapat lahan sawah 21.000 lahan baku - Produktivitas sawah diharapkan meningkat - Studi apa yang dibutuhkan untuk Sungai Ampal Balikpapan		Kementerian PUPR, BPIW: - Diakomodir, karena Sungai Karang Mumus masih berjalan - Pengendalian banjir Kota Samarinda yang terbangun  Kementerian PUPR, SDA: - Karang Mumus dari Balai menjadi lokus untuk pelaksanaan kegiatan		Dit. Sumber Daya Air: - Pengendalian banjir Karang Mumus direkomendasikan			

**NOTULENSI**  
**PERSIDANGAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (MUSRENBANGNAS) TAHUN 2024**

**PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

		- Pemprov dan Pemkot Samarinda sudah melakukan pembebasan lahan							
No	Usulan	Volume		Satuan	Lokasi Kab/Kota	Kementerian/Lembaga	Hasil Kesepakatan		
		Usulan	Kesepakatan						
9	09 Pembangunan Jalan Tol Samarinda - Bontang	-	94	94	km	Kab. Kutai Kartanegara, Kota Samarinda, Kota Bontang	Kementerian PUPR	<p style="text-align: center;"><b>Diakomodir</b></p> <p>Dengan catatan dibutuhkan penyesuaian nomenklatur dokumen AMDAL dan DPPT di tahun 2025 dan didorong pelaksanaan fisiknya di tahun 2026</p>	
		<b>Agenda Pembangunan</b>		<b>Sasaran Visi</b>		<b>Arah Pembangunan Nasional</b>			
		02 - Transformasi Ekonomi		01 - Pendapatan Per Kapita Setara Negara Maju		11 - Stabilitas Ekonomi Makro			
		<b>Program</b>	<b>Kegiatan</b>		<b>KRO</b>		<b>RO</b>		
		Program Infrastruktur Konektivitas	Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional		Prasarana Bidang Konektivitas Darat (Jalan)		Pembangunan Jalan Bebas Hambatan		
		<b>Catatan dan Tanggapan</b>							
		<b>Pemerintah Daerah</b>		<b>Kementerian Lembaga</b>		<b>Direktorat Sektor Bappenas</b>			
		Bappeda Kaltim: - Pengalaman Balikpapan-Samarinda sepakat melalui KPBU, bercermin dari pengalaman tersebut, Pemerintah Daerah membebaskan		Kementerian PUPR, BPIW: - Sudah menjadi bagian dari Jalan Nasional untuk mendukung konektivitas Kalimantan (sudah ditangani Bina Marga) Tol Samarinda-Bontang		Dit. Transportasi: - Tol saat ini Balikpapan-Samarinda dan lanjutannya adalah Samarinda-Bontang - Kelayakan Balikpapan-Samarinda masih difokuskan pada tol di IKN			

**NOTULENSI**  
**PERSIDANGAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (MUSRENBANGNAS) TAHUN 2024**

**PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

		<p>lahan, sebagian membangun konstruksi</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemprov Kaltim kurang lebih menganggarkan 3 Triliun</li> <li>- Pembangunan jalan Samarinda-Bontang jika melalui APBN tidak mungkin (akan ada intervensi dari Pemda) sehingga bersama-sama menyiapkan</li> <li>- Bina Marga sebelum covid sudah menyiapkan untuk pembangunan Jalan Tol Samarinda-Bontang</li> <li>- Studi kelayakan sudah ada, sudah dipetakan di dalamnya mana yang KPBU mana yang swasta</li> <li>- Pendanaan akan dilakukan koordinasi antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah</li> <li>- Akan dipersiapkan RC-nya</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Akan menggunakan dana non APBN (masih dalam kajian)</li> <li>- 2026-2029 akan dialokasikan, tahun 2025 belum akan dilakukan</li> <li>- DED dan lahannya belum siap</li> <li>- Bukan PSN, sehingga didahulukan IKN untuk tol</li> <li>- Rencananya akan didanai oleh <i>loan</i></li> <li>- Akan menyesuaikan <i>action</i> program yang ada di Musrenbangnas</li> <li>- Konreg dibahas gelondongan untuk jalan tol</li> <li>- Berdasarkan pembahasan tersebut tidak dipisahkan RC-nya</li> <li>- Tidak diakomodir untuk program tersebut</li> <li>- Namun perlu konfirmasi dari Bina Marga apakah dapat dilakukan pemecahan</li> <li>- Pembangunan akan dilakukan jika sudah memenuhi persyaratannya</li> <li>- Rencum di Bina Marga, ruas jalan ini didukung pada 2025-2029</li> <li>- Masih banyak RC yang belum terpenuhi</li> <li>- Belum ada pihak yang ingin <i>handle</i> ruas jalan tol Samarinda-Bontang</li> </ul> <p>Kementerian PUPR, Bina Marga:</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tahun 2024 masih dalam kajian AMDAL dan tahun depan pelaksanaan</li> <li>- Diarahkan keskema KPBU dan tidak melalui APBN karena masih memfokuskan pada IKN untuk APBN</li> <li>- RC tahun ini lahannya masih belum ada, sehingga tidak memungkinkan dikerjakan pada tahun 2025</li> <li>- Lahan dan AMDAL disediakan Pemerintah Daerah</li> <li>- Konsentrasi pusat untuk lahan belum disediakan untuk tol</li> <li>- Belum bisa diberikan gambaran pada tahun 2025 akan didukung secara apa</li> <li>- Ketersediaan lahan yang siap sudah berapa persen belum diinformasikan</li> <li>- Lampiran KPBU belum ada di lampiran SPBI</li> <li>- Tol ini akan diprogramkan pada tahun ini, namun pembangunannya sambil menunggu persiapan</li> </ul>	
--	--	---	--	---	--



**BAPPENAS**  
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/  
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

## NOTULENSI

### PERSIDANGAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (MUSRENBANGNAS) TAHUN 2024

#### PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

			<ul style="list-style-type: none"><li>- Tol Samarinda-Bontang tahun 2025 belum memungkinkan jika dilihat RC-nya</li><li>- Perlu ada pertimbangan volume lalu lintas tol Balikpapan-Samarinda</li><li>- Saat ini RC sedang proses untuk dokling</li><li>- Terkait pembebasan lahan yang belum dilaksanakan</li><li>- Saat ini sedang berproses AMDAL, lanjutannya DPPT (Tol Samarinda-Bontang akan menggunakan skema KPBU)</li><li>- Perlu penyiapan RC yang berproses dan bertahap</li><li>- RC tetap berproses untuk penyiapan AMDAL, tahun 2025 adalah dokumen DPPT</li><li>- <i>Support</i> dari Pemda adalah pembebasan lahannya</li><li>- Skema KPBU juga terkait investor yang tertarik dalam proses pembangunannya</li><li>- AMDA 2025 oleh Kementerian PUPR</li><li>- DPPT akan dilakukan oleh pusat</li><li>- Pembangunan jalan tol pada anggaran 2025, jika RC belum siap sama dengan konsep pada Konreg PUPR</li></ul>		
--	--	--	---	--	--

**NOTULENSI**  
**PERSIDANGAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (MUSRENBANGNAS) TAHUN 2024**

**PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

				- Akan dilakukan <i>exercise</i> kembali untuk mengakomodir kesiapan RC					
No	Usulan	Volume		Satuan	Lokasi Kab/Kota	Kementerian/Lembaga	Hasil Kesepakatan		
		Usulan	Kesepakatan						
10	10 Pembangunan Bandara Ujoh Bilang -	1	1	Unit	Kab. Mahakam Ulu	Kementerian Perhubungan	<p style="text-align: center;"><b>Diakomodir</b></p> <p>Dengan catatan penyesuaian nomenklatur agar dapat didorong pembangunan fisiknya pada tahun 2026-2029</p>		
		<b>Agenda Pembangunan</b>		<b>Sasaran Visi</b>		<b>Arah Pembangunan Nasional</b>			
		02 - Transformasi Ekonomi		02 - Kemiskinan Menuju Nol Persen dan Menurunnya Ketimpangan		11 - Stabilitas Ekonomi Makro			
		<b>Program</b>	<b>Kegiatan</b>	<b>KRO</b>		<b>RO</b>			
		Program Infrastruktur Konektivitas	Infrastruktur Konektivitas Transportasi Udara	Prasarana Bidang Konektivitas Udara		Bandar Udara Baru			
		<b>Catatan dan Tanggapan</b>							
		<b>Pemerintah Daerah</b>		<b>Kementerian Lembaga</b>		<b>Direktorat Sektor Bappenas</b>			
<p>Bappeda Kaltim:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemda sudah siap untuk membiayai sebagian pembangunan dari Bandara</li> <li>- Sudah disepakati Nota Kesepakatan antara Pemda dan Pemkab</li> <li>- Pemkab sudah disiapkan lahan dan jalan akses</li> </ul>		<p>Kementerian Perhubungan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sisi udara dari hasil kajian penlok, masih ada beberapa hal yang harus dikaji terutama aliran sungai</li> <li>- Adanya <i>obstacle</i> yang berpotensi pesawat ATR tidak bisa mendarat</li> <li>- Penlok sudah cukup lama yaitu tahun 2010, perlu dikaji kembali penloknya</li> </ul>		<p>Dit. Transportasi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sudah dilakukan diskusi dengan Pemda mengenai bandara baru</li> <li>- Kesiapan sudah dilakukan akan tetapi FS dan masterplannya disusun sudah cukup lama dan membutuhkan <i>review</i> dari Kemenhub</li> </ul>					

**NOTULENSI**  
**PERSIDANGAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (MUSRENBANGNAS) TAHUN 2024**

**PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemprov untuk membiayai sisi darat (terminal)</li> <li>- Kemenhub diharapkan untuk mengintervensi sisi udara</li> <li>- Sudah dilakukan <i>land clearing</i> untuk jalan aksesnya</li> <li>- Tahun 2023 sudah mengalokasikan dana untuk terminal (kesepakatannya belum ada sehingga <i>ter-pending</i>)</li> <li>- Sisi darat dari Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2025</li> <li>- Menuju Ibukota Provinsi dari Mahakam Ulu adalah 3 hari 2 malam</li> <li>- Perlu ada kesepakatan apa yang akan dilakukan serta komitmennya</li> <li>- Penlok Ujoh Bilang dan Paser sudah keluar</li> <li>- Sejak 2 tahun lalu sudah disampaikan kepada Kemenhub untuk MoU (tinggal di-ttd Kemenhub)</li> </ul> <p>Dishub Kaltim:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bandara Ujoh Bilang RC-nya sudah siap</li> <li>- Penlok, DED, lahan, izin lingkungan sudah siap harusnya dapat didanai oleh bantuan APBN</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Belum bisa diakomodir, karena masih menunggu RPJMN</li> <li>- Ujoh Bilang belum masuk dalam lokus Kemenhub dan belum masuk ke dalam RPJMN</li> <li>- Pada Trilateral <i>Meeting</i> akan dibahas lebih lanjut</li> <li>- Rekomendasi sudah dilakukan semua (tidak dapat diakomodir karena tidak ada payung hukumnya)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rapat yang telah dilakukan untuk melihat potensi secara urgensi di RPJMN tahun berikutnya yang secara kesiapan sudah dimulai</li> <li>- Untuk tahun 2025, agak sulit untuk dilakukan pembangunan fisiknya</li> <li>- Anggaran yang turun cukup signifikan serta moratorium</li> <li>- Bandara yang masuk ke dalam RPJMN sedang dilakukan Analisa</li> <li>- Harapannya potensi bandara ini tidak ingin hilang dalam periode teknokratik RPJMN</li> <li>- Usulan <i>carry over</i> atas usulan baru akan dibahas dalam pembahasan selanjutnya</li> <li>- Pembangunan fisik di tahun 2025 sulit dilakukan, indikasi RPJMN belum bisa disampaikan</li> <li>- Rincian lokasi tidak dapat disampaikan saat ini</li> <li>- Bandara Balikpapan dan Samarinda yang sudah dikembangkan serta pembangunan Bandara WVIP</li> <li>- Perlu ada semacam perencanaan jaringan transportasi udara di Kalimantan Timur</li> <li>- Masih ada potensi untuk masuk ke dokumen RPJMN</li> <li>- RC dari sisi Pemerintah Pusat</li> </ul>	
--	--	---	--	--	--



**BAPPENAS**  
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/  
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

## NOTULENSI

### PERSIDANGAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (MUSRENBANGNAS) TAHUN 2024

#### PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

	<ul style="list-style-type: none"><li>- Beberapa kali sudah dilakukan koordinasi dengan Menteri terkait Bandara Ujoh Bilang</li><li>- Posisinya berada di perbatasan dan berada di kawasan 3T</li><li>- Tahapan dari FS beberapa tahapan sudah selesai</li><li>- Lahan sudah berbentuk sertifikat</li><li>- Tahun 2023 sudah menganggarkan 56 miliar untuk pembangunan sisi darat (belum bisa dilaksanakan karena belum ada kepastian dari APBN berbentuk apa dari sisi udara)</li><li>- Harapannya bisa masuk ke dalam RPJMN 2025-2029</li><li>- 150 miliar sudah dianggarkan oleh Kab. Mahakam Ulu untuk membangun jalan ke Bandara Ujoh Bilang</li><li>- Sisi darat belum tersentuh, sehingga untuk sisi udara bisa diakomodir oleh APBN</li><li>- Pembangunan akses jalan ke bandara APBD Kab. Mahakam Ulu</li><li>- Lahannya dari Kab. Mahakam Ulu</li><li>- Untuk FS dimulai tahun 2016, dan penlok keluar di akhir 2022</li><li>- Sudah dilaksanakan <i>review</i> DED pada tahun 2022</li><li>- Hasil <i>review</i> juga sudah terbaru, pertengahan 2023</li></ul>		<ul style="list-style-type: none"><li>- Tahun 2025 menyiapkan RC dari Kemenhub, sedangkan daerah dokumen-dokumennya</li><li>- Rekomendasi apakah sudah selesai dari Kemenhub</li><li>- Apa yang jadi kewenangan pusat, hasil <i>review</i> DED apa yang harus dilakukan</li><li>- Tahun 2025 PR-nya membuat MoU untuk didorong diselesaikan (payung hukum)</li></ul>	
--	--	--	--	--

**NOTULENSI**  
**PERSIDANGAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (MUSRENBANGNAS) TAHUN 2024**

**PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Obstacle 2</i> sudah ada skenario pendaratannya (ketika sudah dilakukan pembangunan sisi udara)</li> <li>- Permasalahannya belum diakomodir RPJMN sehingga tidak bisa dibantu dan dialokasikan pada APBN</li> </ul>							
No	Usulan	Volume		Satuan	Lokasi Kab/Kota	Kementerian/Lembaga	Hasil Kesepakatan		
		Usulan	Kesepakatan						
11	11 Pembangunan Bandara Paser	1	1	Unit	Kab. Paser	Kementerian Perhubungan	<p style="text-align: center;"><b>Diakomodir</b></p> <p>Dengan catatan <i>review</i> masterplan selesai tahun 2024 dan masuk ke dalam RPJMN</p>		
		Agenda Pembangunan		Sasaran Visi		Arah Pembangunan Nasional			
		02 - Transformasi Ekonomi		01 - Pendapatan Per Kapita Setara Negara Maju		11 - Stabilitas Ekonomi Makro			
		Program	Kegiatan	KRO		RO			
		Program Infrastruktur Konektivitas	Infrastruktur Konektivitas Transportasi Udara	Prasarana Bidang Konektivitas Udara		Bandar Udara Baru			
		Catatan dan Tanggapan							
		Pemerintah Daerah		Kementerian Lembaga		Direktorat Sektor Bappenas			
		<p>Bappeda Kaltim:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemda sudah siap untuk membiayai sebagian pembangunan dari Bandara</li> <li>- Sudah disepakati Nota Kesepakatan antara Pemda dan Pemkab</li> </ul>		<p>Kementerian Perhubungan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sisi udara dari hasil kajian penlok, masih ada beberapa hal yang harus dikaji terutama aliran sungai</li> <li>- Adanya <i>obstacle</i> yang berpotensi pesawat ATR tidak bisa mendarat</li> </ul>		<p>Dit. Transportasi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sudah dilakukan diskusi dengan Pemda mengenai bandara baru</li> <li>- Kesiapan sudah dilakukan, akan tetapi FS dan masterplannya sudah cukup lama, perlu ada <i>review</i> dari Kemenhub</li> </ul>			

**NOTULENSI**  
**PERSIDANGAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (MUSRENBANGNAS) TAHUN 2024**

**PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemkab sudah disiapkan lahan dan jalan akses</li> <li>- Pemprov untuk membiayai sisi darat (terminal)</li> <li>- Kemenhub diharapkan untuk mengintervensi sisi udara</li> <li>- Sudah dilakukan <i>land clearing</i> untuk jalan aksesnya</li> <li>- Tahun 2023 sudah mengalokasikan dana untuk terminal (kesepakatannya belum ada sehingga <i>ter-pending</i>) sisi darat dari Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2025</li> <li>- Menuju Ibukota Provinsi dari Mahakam Ulu adalah 3 hari 2 malam</li> <li>- Perlu ada kesepakatan apa yang akan dilakukan dan komitmen</li> <li>- Penlok Ujoh Bilang dan Paser sudah keluar sejak 2 tahun lalu sudah disampaikan kepada Kemenhub untuk MoU (tinggal di-ttd oleh Kemenhub)</li> <li>- Review akan dilakukan tahun 2024</li> <li>- Paser komitmennya di sisi apa, apakah ide dari Paser untuk membagi seperti Ujoh Bilang</li> <li>- Inisiatornya Kemenhub atau Pemkab Paser untuk dilakukan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penlok sudah cukup lama tahun 2010, perlu dikaji Kembali</li> <li>- Belum bisa diakomodir, karena masih menunggu RPJMN</li> <li>- Ujoh Bilang belum masuk dalam lokus Kemenhub dan belum masuk ke dalam RPJMN</li> <li>- Pada Trilateral Meeting akan dibahas lebih lanjut</li> <li>- Rekomendasi sudah dilakukan semua (tidak dapat diakomodir karena tidak ada payung hukumnya)</li> <li>- RC sudah semua</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rapat yang telah dilakukan untuk melihat potensi secara urgensi di RPJMN tahun berikutnya yang secara kesiapan sudah dimulai</li> <li>- Untuk 2025 agak sulit dilakukan pembangunan fisiknya</li> <li>- Anggaran yang turun cukup signifikan serta moratorium</li> <li>- Bandara yang masuk ke dalam RPJMN sedang dilakukan Analisa</li> <li>- Harapannya potensi bandara ini tidak ingin hilang dalam periode teknokratik RPJMN</li> <li>- Usulan <i>carry over</i> atau usulan baru akan dibahas dalam pembahasan selanjutnya</li> <li>- Pembangunan fisik di tahun 2025 sulit dilakukan, indikasi RPJMN belum bisa disampaikan</li> <li>- Rincian lokasi tidak dapat disampaikan saat ini</li> <li>- Bandara Balikpapan dan Samarinda yang sudah dikembangkan serta pembangunan Bandara WVIP</li> <li>- Perlu ada semacam perencanaan jaringan transportasi udara di Kalimantan Timur</li> <li>- Masih ada potensi untuk masuk ke dokumen RPJMN</li> <li>- RC dari sisi Pemerintah Pusat</li> <li>- Tahun 2025 menyiapkan RC dari Kemenhub</li> </ul>	
--	--	---	---	---	--



**BAPPENAS**  
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/  
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

## NOTULENSI

### PERSIDANGAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (MUSRENBANGNAS) TAHUN 2024

#### PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

		<p>pembicaraan kembali terkait pembiayaannya</p> <p>Dishub Kaltim:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Bandara Ujoh Bilang RCnya sudah siap</li><li>- Penlok, DED, lahan, izin lingkungan sudah siap</li><li>- Harapannya dapat didanai oleh bantuan APBN</li><li>- Beberapa kali sudah dilakukan koordinasi dengan Menteri terkait Bandara Ujoh Bilang</li><li>- Posisinya berada di perbatasan dan berada di kawasan 3T</li><li>- Tahapan dari FS beberapa tahapan sudah selesai</li><li>- Lahan sudah berbentuk sertifikat</li><li>- Tahun 2023 sudah menganggarkan 56 Miliar untuk pembangunan sisi darat (belum bisa dilaksanakan karena belum ada kepastian dari APBN berbentuk apa dari sisi udara)</li><li>- Harapannya bisa masuk dalam RPJMN 2025-2029</li><li>- 150 Miliar sudah dianggarkan oleh Kab. Mahakam Ulu untuk membangun jalan ke Bandara Ujoh Bilang</li></ul>		<ul style="list-style-type: none"><li>- Apa yang jadi kewenangan pusat, hasil <i>review</i> DED apa yang harus dilakukan</li><li>- Tahun 2025 PR nya membuat MoU untuk didorong diselesaikan</li><li>- Penlok sudah ada</li><li>- <i>Review</i> DED sudah, <i>sharing</i> anggaran, posisi sama dengan Bandara Ujoh Bilang</li><li>- RPJMN masih berproses, catatan sama dengan Bandara Ujoh Bilang</li><li>- Ada perubahan usulan <i>runway</i>, meningkat dari sebelumnya (perlu ada <i>review</i> masterplan oleh Pemda)</li></ul>	
--	--	--	--	---	--

**NOTULENSI**  
**PERSIDANGAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (MUSRENBANGNAS) TAHUN 2024**

**PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sisi darat belum tersentuh, sehingga sisi udara bisa diakomodir oleh APBN di Kemenhub</li> <li>- Pembangunan akses jalan ke bandara APBD Kab. Mahakam Ulu</li> <li>- Lahannya dari Kab. Mahakam Ulu</li> <li>- Untuk FS dimulai 2016 dan penlok keluar di akhir 2022</li> <li>- Sudah dilaksanakan <i>review</i> DED pada tahun 2022</li> <li>- Hasil <i>review</i> juga sudah terbaru (pertengahan 2023)</li> <li>- <i>Obstacle 2</i> sudah ada skenario pendaratannya ketika sudah dilakukan pembangunan sisi udara</li> <li>- Permasalahannya hanya belum diakomodir di RPJMN sehingga tidak bisa dibantu dan dialokasikan pada APBN</li> <li>- <i>Review design</i> dan DED sudah dilaksanakan</li> <li>- Hasil audiensi dengan Kemenhub diminta studi pendahuluan sudah dilaksanakan dan dipaparkan</li> <li>- <i>Review</i> masterplan dilaksanakan pada tahun 2024, dianggarkan berkaitan dengan perubahan panjang <i>runway</i> dan dengan adanya IKN</li> <li>- Melanjutkan pembangunan 2011-2014 (sebelum ada rencana IKN)</li> </ul>			
--	--	--	--	--	--

**NOTULENSI**  
**PERSIDANGAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (MUSRENBANGNAS) TAHUN 2024**

**PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pembiayaan melalui mekanisme KPBU</li> <li>- Pada 2014 terhenti, dilakukan pembangunan melalui APBD</li> <li>- Kewenangan untuk bandar udara ada di Pemerintah Pusat (ada kendala untuk melanjutkan)</li> <li>- Pada saat ingin dihibahkan terdapat kendala</li> <li>- Bupati Paser merekomendasikan melalui mekanisme KPBU</li> <li>- Tahun ini sudah dilakukan persiapan yang mengarah ke KPBU</li> <li>- Jika dihibahkan sudah siap</li> </ul>						
No	Usulan	Volume		Satuan	Lokasi Kab/Kota	Kementerian/Lembaga	Hasil Kesepakatan	
		Usulan	Kesepakatan					
12	12 - Pembangunan PLTS <i>Off Grid</i> Kampung Nyaribungan Kec. Laham Kab. Mahakam Ulu	30	30	kWp	Kab. Mahakam Ulu	Kementerian ESDM	<b>Diakomodir</b> Dengan catatan PLN harus memberikan <i>statement</i> bahwa PLN tidak akan mengintervensi di wilayah tersebut dan diputuskan dalam <i>Trilateral Meeting</i>	
		Agenda Pembangunan		Sasaran Visi		Arah Pembangunan Nasional		
		02 - Transformasi Ekonomi		05 - Intensitas Emisi GRK Menurun Menuju Net Zero Emission		05 - Penerapan Ekonomi Hijau		
		Program	Kegiatan		KRO			RO
		Program Energi dan Ketenagalistrikan	Perencanaan, Pembangunan dan Pengawasan Infrastruktur Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi		Bantuan Peralatan / Sarana			PLTS Terpadu
		Catatan dan Tanggapan						

**NOTULENSI**  
**PERSIDANGAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (MUSRENBANGNAS) TAHUN 2024**

**PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

		<b>Pemerintah Daerah</b>	<b>Kementerian Lembaga</b>	<b>Direktorat Sektor Bappenas</b>
		<p>Bappeda Kaltim:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- PLTS di Mahakam Ulu berada di daerah yang terpencil</li> <li>- Dokumen sudah siap (DED dan lahan)</li> <li>- Kab. Berau diusulkan daerah ke pusat</li> <li>- Yang diusulkan merupakan usulan baru</li> <li>- Ada rencana PLN, namun sampai kapan wilayah ini padam</li> <li>- Merupakan daerah perbatasan (berada di Kab. Mahakam Ulu)</li> <li>- Kab. Mahakam Ulu yang sudah berlistrik ada di Ibukota Kabupaten (Ujoh Bilang)</li> <li>- Merupakan kabupaten yang baru dan berada di perbatasan (akses listrik dan infrastruktur dasar masih minim)</li> </ul> <p>Dinas ESDM Kaltim:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Belum dijadwalkan pembangunannya</li> <li>- Lokasinya sangat jauh dari PLN dan berada di wilayah 3T</li> <li>- Sudah dilakukan koordinasi dengan PLN untuk 4 desa, tetapi tidak masuk dalam 5 tahun ke depan (ada berita acara)</li> </ul>	<p>Kementerian ESDM:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sesuai usulan di Renja ESDM (Kab. Berau)</li> <li>- Pemda ada di usulan Kab. Mahakam Ulu</li> <li>- KESDM berusaha untuk melistriki daerah 3T</li> <li>- Secara kecamatan belum termasuk di wilayah 3T</li> <li>- Apabila ingin tetap diusulkan, diharapkan untuk wilayah 3T terlebih dahulu</li> <li>- Listrik PLN belum ada di lokasi terkait, namun sudah ada listrik dari non-PLN</li> <li>- Kec. Laham belum masuk ke dalam rencana 2025-2029</li> <li>- Sesuai dengan RC yang diterapkan, untuk Pemda diharapkan untuk melakukan koordinasi dengan PLN</li> <li>- PLN melakukan pengembangan jaringan listrik, sehingga pembangunan yang dibangun dari Kementerian ESDM kurang efektif</li> <li>- Diusulkan Kec. Laham pada lokasi perbatasan untuk mendukung <i>database</i> perbatasan Kementerian ESDM</li> <li>- Diharapkan ada hitam di atas putih dari PLN</li> </ul>	<p>Dit. Sumber Daya Energi, Mineral dan Pertambangan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- PLTS <i>off grid</i> sudah terbahas pada Rakortek</li> </ul>

**NOTULENSI**  
**PERSIDANGAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (MUSRENBANGNAS) TAHUN 2024**

**PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mahakam Ulu tidak <i>full</i> listriknya 24 jam</li> <li>- Sudah dilakukan <i>follow up</i> dan sudah dilakukan pengumpulan dokumen</li> <li>- Long Apari sudah dianggarkan pada tahun 2025 (3 lokasi dan DED pada tahun ini)</li> <li>- Secara lokasi, PLN masuk akan tetapi Kec. Laham aksesnya sangat jauh dan jalan daratnya tidak ada</li> <li>- Mahakam Ulu dan Berau sama-sama perlu diperhatikan dan diprioritaskan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Diharapkan adanya forum untuk Kab. Mahakam Ulu dan Kab. Berau</li> <li>- Pagu indikatif belum disepakati bersama, sementara di setiap provinsi hanya 1</li> <li>- Dapat diusulkan kembali pada usulan Musrenbangnas 2026</li> </ul>					
No	Usulan	Volume		Satuan	Lokasi Kab/Kota	Kementerian/Lembaga	Hasil Kesepakatan	
		Usulan	Kesepakatan					
13	13 - Pembangunan Biogas Program Desa Korporasi Ternak	15	15	Unit	Kab. Paser, Kab. Kutai Kartanegara, Kab. Kutai Timur, Kab. Berau	Kementerian ESDM	<p style="text-align: center;"><b>Diakomodir</b></p> <p>Dengan catatan untuk pelatihan dan pendampingan serta dibahas pada <i>Trilateral Meeting</i></p>	
		Agenda Pembangunan		Sasaran Visi		Arah Pembangunan Nasional		
		02 - Transformasi Ekonomi		05 - Intensitas Emisi GRK Menurun Menuju Net Zero Emission		05 - Penerapan Ekonomi Hijau		
		Program	Kegiatan	KRO		RO		
		Program Energi dan Ketenagalistrikan	Pengelolaan Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi	Data dan Informasi Publik		Peta Potensi EBT dalam Rangka Percepatan Investasi		

**NOTULENSI**  
**PERSIDANGAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (MUSRENBANGNAS) TAHUN 2024**

**PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

				PLT Bayu, Hidro, Biomassa dan Surya
<b>Catatan dan Tanggapan</b>				
	<b>Pemerintah Daerah</b>	<b>Kementerian Lembaga</b>	<b>Direktorat Sektor Bappenas</b>	
	<p>Bappeda Kaltim:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Biogas di Kalimantan Timur ada program korporasi ternak</li> <li>- Bagaimana memanfaatkan limbah/kotoran dari ternak untuk bisa dimanfaatkan kembali di peternakan dan menjadi energi</li> <li>- UU 23 tahun 2014 pada EBT tidak ada kewenangan di Provinsi</li> <li>- Kalimantan Timur ditargetkan di RPJPD, EBT Kaltim 79%</li> <li>- Tidak mungkin Kalimantan Timur melakukan sendiri tanpa intervensi dari Pemerintah Pusat</li> <li>- Mengenai Perpres 11 Tahun 2023, namun di Perpres tersebut juga ada PLTS (Provinsi dan Pusat dapat membangun)</li> </ul> <p>Dinas ESDM Kaltim:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Biogas yang akan dibantu konsepnya berbeda dengan biogas Rumah Tangga</li> <li>- Biogas Rumah Tangga banyak yang tidak termanfaatkan selama beberapa tahun</li> </ul>	<p>Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tahun 2025 belum ada rencana pembangunan biogas</li> <li>- Kebijakan mendorong melalui kerja sama atau mekanisme lain</li> <li>- Sudah disepakati di Perpres 11 terkait kewenangan daerah (biogas yang di dalam provinsi menjadi kewenangan daerah)</li> <li>- Pada Rakortek, informasi pada Perpres belum disampaikan</li> <li>- Kebijakan di Kementerian ESDM belum ada terkait biogas</li> <li>- Dukungan yang diberikan bukan dalam bentuk infrastruktur, namun pemenuhan kriteria teknis, panduan dan lainnya bisa dibantu</li> <li>- Kegiatan yang sifatnya bukan membangun dapat dilakukan</li> </ul>	<p>Dit. Sumber Daya Energi, Mineral dan Pertambangan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Biogas sampai sejauh ini belum ada di Renja</li> <li>- Biogas diharapkan bisa melalui APBD atau KPBU</li> <li>- Biogas terdapat permasalahan di kewenangan antara pusat atau daerah</li> <li>- Untuk anggaran belum ada biogas pada tahun 2025</li> </ul> <p>Penanggung Jawab Peta:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Geotagging</i> kurang 1 titik</li> </ul>	

**NOTULENSI**  
**PERSIDANGAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (MUSRENBANGNAS) TAHUN 2024**

**PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

		- Konsepnya adalah dari hulu ke hilir (sapi dan EBT-nya di-support oleh biogas) - Kewenangan jika ada <i>exceptional</i> , dapat di-support untuk pembangunan energi)							
No	Usulan	Volume		Satuan	Lokasi Kab/Kota	Kementerian/Lembaga	Hasil Kesepakatan		
		Usulan	Kesepakatan						
14	14 - Pembangunan Jembatan Sungai Riko	700	0	Meter	Kab. Penajam Paser Utara	Kementerian PUPR	<p style="text-align: center;"><b>Ditolak</b></p> <p>Dengan catatan tetap mendorong kegiatan ini melalui beberapa alternatif pembiayaan seperti Inpres, DAK maupun direktif langsung dari Pemerintah Pusat untuk melaksanakan amanat Perpres 63 Tahun 2022, khususnya dukungan terhadap daerah mitra Ibu Kota Nusantara</p>		
		Agenda Pembangunan		Sasaran Visi		Arah Pembangunan Nasional			
		02 - Transformasi Ekonomi		02 - Kemiskinan Menuju Nol Persen dan Menurunnya Ketimpangan		11 - Stabilitas Ekonomi Makro			
		Program	Kegiatan	KRO		RO			
		Catatan dan Tanggapan							
		Pemerintah Daerah		Kementerian Lembaga		Direktorat Sektor Bappenas			
<p>Bappeda Kaltim:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Untuk usulan remedial hanya mendorong kembali dari amanat Perpres 63 tahun 2022</li> <li>- Infrastruktur yang menunjang <i>superhub</i> ekonomi seharusnya rampung pada tahun 2024</li> </ul>		<p>Kementerian PUPR, BPIW:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Jembatan Sungai Riko dalam RPIW belum masuk menjadi program pembangunan</li> <li>- Masuk ke dalam KI Bulumuning</li> <li>- PUPR jika untuk mendukung KI memungkinkan, namun terkait aksesnya</li> </ul>		<p>Dit. Transportasi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Menjadi perhatian statusnya adalah non-status saat ini belum ada ruang untuk jalan non status</li> <li>- Lebih aman apabila usulannya langsung dari Kementerian PUPR atau Bappenas</li> </ul>					



**BAPPENAS**  
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/  
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

## NOTULENSI

### PERSIDANGAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (MUSRENBANGNAS) TAHUN 2024

#### PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Jembatan Sungai Riko untuk mendukung akses KI Buluminung</li> <li>- Selain jembatan juga ada jalan</li> <li>- Merupakan jalan akses untuk KI Buluminung</li> <li>- Jembatan Sungai Riko akses jalannya masih non-status</li> <li>- Untuk jalan akses Jembatan Sungai Riko 4-6 km non status, jika melalui DAK tidak memungkinkan</li> <li>- Antara ruas jalan Inpres dengan akses Jalan Sungai Riko berbeda (Inpres merupakan jalan daerah)</li> <li>- Untuk membangun jalan ke Kawasan Industri merupakan amanat pada Perpres 63 Tahun 2022</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pembangunan tahun 2025 belum dapat diprioritaskan</li> <li>- Masih ada tol IKN yang didorong terlebih dahulu</li> <li>- Masih harus ada pembahasan terkait program ini lebih lanjut dan detail</li> <li>- Jalan akses buluminung merupakan jalan daerah</li> <li>- Membangun jembatan tidak bisa sendiri (menerus dengan aksesnya)</li> <li>- Masih ada jalan rencana Jalan Nasional yang dibangun, ada ruas semacam akses ke Riko namun dibutuhkan informasi lebih detail terkait statusnya</li> </ul> <p>Kementerian PUPR, Bina Marga:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Diluar kewenangan Bina Marga</li> <li>- Ada SK Rencana Umum Jaringan Jalan (pelaksanaannya melalui rencum)</li> <li>- Kewenangan diluar non nasional penanganannya melalui DAK atau direktif</li> <li>- Kemungkinan bisa dilakukan secara direktif dari Menteri</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- DAK jalan kabupaten/provinsi yang ber-SK</li> <li>- Pengaruhnya kepada kemantapan jalan pada SK-nya</li> <li>- Transportasi perdesaan pengampunya bukan pada Dit. Transportasi</li> </ul>			
No	Usulan	Volume		Satuan	Lokasi Kab/Kota	Kementerian/Lembaga	Hasil Kesepakatan
		Usulan	Kesepakatan				

**NOTULENSI**  
**PERSIDANGAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (MUSRENBANGNAS) TAHUN 2024**

**PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

<b>15</b>	16 Pengembangan Bandar Udara APT Pranoto	3000	3000	Meter	Kota Samarinda	Kementerian Perhubungan	<b>Diakomodir</b> Dengan catatan ruang lingkup <i>runway</i> atau apron akan dibahas pada <i>Trilateral</i> <i>Meeting</i>	
		<b>Agenda Pembangunan</b>		<b>Sasaran Visi</b>		<b>Arah Pembangunan Nasional</b>		
		02 - Transformasi Ekonomi		01 - Pendapatan Per Kapita Setara Negara Maju		11 - Stabilitas Ekonomi Makro		
		<b>Program</b>	<b>Kegiatan</b>	<b>KRO</b>		<b>RO</b>		
		<b>Catatan dan Tanggapan</b>						
		<b>Pemerintah Daerah</b>		<b>Kementerian Lembaga</b>		<b>Direktorat Sektor Bappenas</b>		
		<p>Bappeda Kaltim:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Penahapan terkait lahan, untuk perpanjangan landasan pacu</li> <li>- Masih proses <i>review</i> masterplan</li> <li>- Tahun 2025 ingin perpanjangan hingga 3000</li> <li>- DPPT mohon disiapkan oleh Kemenhub</li> <li>- Komitmen daerah untuk Bandara APT Pranoto Dinas Perhubungan</li> <li>- Penahapannya belum selesai, namun eksisting panjangnya 300 meter x 132 meter</li> <li>- Lahan untuk apron sudah ada</li> <li>- Perpanjangan lahannya sudah ada</li> </ul>		<p>Kementerian PUPR, BPIW:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bandara Apt Pranoto tahun 2024 sebagai pendukung IKN, tahun 2025 mengikuti tahapan masterplan, usulan sebelum pagu indikatif keluar</li> <li>- Pelaksanaan apron masih menunggu anggaran</li> <li>- Bandara APT Pranoto sebagai bandara penunjang IKN, tahun 2020 sudah diajukan revisi masterplan, pembangunannya masih menggunakan masterplan yang lama, ada beberapa tambahan seperti <i>taxiway</i></li> <li>- Penambahan apron 2024, total 600 meter, masih dibutuhkan 200</li> </ul>		<p>Dit. Transportasi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Diakomodir, namun butuh konfirmasi ruang lingkup Kemenhub yang akan dilakukan pada tahun 2025</li> <li>- Ruang lingkup akan dibahas pada saat <i>Trilateral Meeting</i></li> </ul>		

**NOTULENSI**  
**PERSIDANGAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (MUSRENBANGNAS) TAHUN 2024**

**PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

			<ul style="list-style-type: none"> <li>meter untuk pelebaran apron sesuai masterplan yang lama</li> <li>- Review masterplan saat ini masih dalam pengesahan di pusat</li> <li>- Kesiapan penambahan lahan untuk pelebaran, <i>runway</i> 2.250 meter x 45 meter, Boeing 737 series sudah mencukupi</li> <li>- Setelah pengesahan masterplan panjang menjadi 3.000 meter</li> <li>- Perlu ada perpanjangan lahan, secara bertahap dan dikomunikasikan ke Pemda</li> </ul>				
No	Usulan	Volume		Satuan	Lokasi Kab/Kota	Kementerian/Lembaga	Hasil Kesepakatan
		Usulan	Kesepakatan				
16	19 - Penempatan Mesin Test Cepat Bakteri TBC (TCM Truenat dan TCM Genexpert)	16	16	Unit	Kab. Paser, Kab. Kutai Barat, Kab. Kutai Kartanegara, Kab. Kutai Timur, Kab. Berau, Kab. Penajam Paser Utara, Kab. Mahakam Ulu, Kota Balikpapan, Kota Samarinda, Kota Bontang	Kementerian Kesehatan	<b>Diakomodir</b> Dengan catatan akan dibahas melalui <i>impulse baseline</i> K/L
		<b>Agenda Pembangunan</b>		<b>Sasaran Visi</b>		<b>Arah Pembangunan Nasional</b>	

**NOTULENSI**  
**PERSIDANGAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (MUSRENBANGNAS) TAHUN 2024**

**PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

	01 - Transformasi Sosial	04 - Daya Saing Sumber Daya Manusia Meningkatkan	01 - Kesehatan untuk Semua	
	<b>Program</b>	<b>Kegiatan</b>	<b>KRO</b>	<b>RO</b>
	Program Kesehatan Masyarakat	Pembinaan Tata Kelola Kesehatan Masyarakat	Bantuan Peralatan / Sarana	Sarana Puskesmas, Pustu dan Posyandu
	<b>Catatan dan Tanggapan</b>			
	<b>Pemerintah Daerah</b>	<b>Kementerian Lembaga</b>	<b>Direktorat Sektor Bappenas</b>	
	<p>Bappeda Kaltim:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyakit TBC sangat diperlukan untuk deteksi cepat</li> <li>- Kutai Barat, Mahakam Ulu, Paser, Berau dan Kutai Timur (akan ditempatkan di puskesmas)</li> <li>- Alat ini diperlukan untuk kebutuhan dan penempatannya sesuai dengan Dinas Kesehatan</li> <li>- 9,6 Miliar anggaran diperlukan</li> </ul> <p>Dinas Kesehatan Kaltim:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- TCM informasinya baru akan dibagikan oleh Kementerian Kesehatan (namun jumlahnya sedikit)</li> <li>- Diusulkan untuk percepatan yang lebih banyak</li> <li>- Akan diletakan di puskesmas terpencil</li> </ul>	<p>Kementerian Kesehatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Prinsipnya setuju dengan Dit. KGM</li> </ul>	<p>Dit. Kesehatan dan Gizi Masyarakat:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Penempatan mesin TCM akan disesuaikan</li> <li>- Pemenuhan TCM akan melalui <i>impulse baseline</i> K/L</li> </ul>	

**NOTULENSI**  
**PERSIDANGAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (MUSRENBANGNAS) TAHUN 2024**

**PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- TCM penyebarannya lebih banyak di daerah perkotaan</li> <li>- Untuk memperkuat diagnosis TB, serta digunakan untuk mendeteksi HIV</li> <li>- Akan diperiksa darahnya untuk mengetahui kadar virusnya</li> <li>- Baru ada di Balikpapan dan Samarinda untuk TCM</li> </ul>						
No	Usulan	Volume		Satuan	Lokasi Kab/Kota	Kementerian/Lembaga	Hasil Kesepakatan	
		Usulan	Kesepakatan					
17	20 - Penyediaan dan Penguatan Akses Jaringan Internet di Perdesaan	38	38	Titik	Kab. Paser, Kab. Kutai Barat, Kab. Kutai Kartanegara, Kab. Kutai Timur, Kab. Penajam Paser Utara	Kementerian Komunikasi dan Informatika	<b>Diakomodir</b> Dengan catatan Pemerintah Daerah melakukan input data pada aplikasi SIGNAL	
		Agenda Pembangunan						Sasaran Visi
		03 - Transformasi Tata Kelola		04 - Daya Saing Sumber Daya Manusia Meningkatkan		06 - Transformasi Digital		
		Program	Kegiatan	KRO		RO		
		Program Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)	Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Digital pada Sektor Ekonomi dan Bisnis	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat		Pemanfaatan Teknologi Digital di Sektor Logistik		
		Catatan dan Tanggapan						

**NOTULENSI**  
**PERSIDANGAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (MUSRENBANGNAS) TAHUN 2024**

**PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

		<b>Pemerintah Daerah</b>	<b>Kementerian Lembaga</b>	<b>Direktorat Sektor Bappenas</b>
		<p>Bappeda Kaltim:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sesuai arahan Presiden RI untuk percepatan transformasi digital</li> <li>- Diperlukan penambahan masuk pada desa</li> <li>- Usulannya berada di kantor desa</li> <li>- Untuk meningkatkan komunikasi dan promosi</li> <li>- Usulan 38 titik (Kab. Kukar, Paser, PPU dan Kubar)</li> <li>- Lokasi sudah ada sampai ke tingkat desa</li> <li>- 35 usulan di kantor desa dan 3 di puskesmas</li> <li>- Syarat untuk mendapatkan jaringan internet sudah diserahkan (titik koordinat)</li> </ul> <p>Diskominfo Kaltim:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Untuk 38 titik tidak ada yang di dalam daerah 3T</li> <li>- 3T lebih banyak di Kab. Mahakam Ulu</li> <li>- 3T untuk wilayah yang <i>blankspot</i></li> <li>- Sedangkan usulan untuk <i>men-trigger</i> kegiatan IT</li> <li>- Supaya ada <i>mindset</i> untuk membutuhkan jaringan internet</li> </ul>	<p>Kementerian Komunikasi dan Informatika:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sudah dipahami bahwa usulannya bukan di 3T</li> <li>- Pada notulen Kominfo ditolak</li> <li>- Perlu koordinasi dengan Pemda dari Kalimantan Timur untuk memasukkan 38 lokasi</li> <li>- Layanan internet disediakan oleh penyelenggaraan seluler ada juga yang ISP</li> <li>- ISP bekerja sama dengan BAKTI, khususnya dengan kantor-kantor pelayanan publik (basisnya adalah kantor)</li> <li>- Penyediaan berbasis seluler ada 2 metode, disediakan BAKTI untuk wilayah 3T, namun untuk wilayah non-3T disediakan oleh penyedia seluler</li> <li>- Tahap awal mendiskusikan 2023 hingga tahun ini sudah dilakukan sosialisasi</li> <li>- Untuk permohonan penyediaan akses internet, khususnya 4G melalui aplikasi</li> <li>- Non-3T ada aplikasi yaitu SIGNAL</li> <li>- Data-data yang masuk ke dalam SIGNAL akan dianalisis, data teknis dan data ekonomi</li> </ul>	<p>Dit. Ketanagalistrikan, Telekomunikasi dan Informatika:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Usulan yang dibaca, akan didorong di daerah 3T</li> <li>- Rakortek direkomendasikan namun perlu ada konfirmasi terkait dengan daerah</li> <li>- Apakah masuk ke dalam daerah 3T</li> <li>- Jika tidak, akan diarahkan ke operator seluler</li> <li>- Jika masuk ke 3T dapat diusulkan pada <a href="http://pasti.baktikominfo.go.id">pasti.baktikominfo.go.id</a></li> <li>- Jika tidak masuk ke 3T, akan diarahkan operator seluler</li> <li>- Diakomodir, namun perlu dikomunikasikan dengan OIKN</li> </ul> <p>Penanggung Jawab Peta:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Geotagging</i> kurang 1 titik</li> </ul>

**NOTULENSI**  
**PERSIDANGAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (MUSRENBANGNAS) TAHUN 2024**

**PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tower dari BAKTI belum maksimal</li> <li>- Sinyal sudah ada 4G namun tidak dapat diakses jaringan internetnya</li> <li>- Fokusnya pada <i>blankspot</i></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Khusus Kaltim, sudah ada 2 daerah yang masuk, Kab. Paser dan Kab. PPU sudah masuk datanya (hanya 2 dari 38 desa yang dimasukkan)</li> <li>- Usulan terkait perlu disesuaikan dengan RO yang ada</li> <li>- RO dialihkan ke Satker Direktorat Telekomunikasi</li> </ul>						
No	Usulan	Volume		Satuan	Lokasi Kab/Kota	Kementerian/Lembaga	Hasil Kesepakatan		
		Usulan	Kesepakatan						
18	21 - Perluasan Areal Tanam Baru berbasis komoditi pangan di kab. Kutai Kartanegara	3000	0	Ha	Kab. Kutai Kartanegara	Kementerian Pertanian	<p style="text-align: center;"><b>Ditolak</b></p> <p>Dengan catatan perlu adanya kajian dari Pemerintah Daerah atau Pemerintah Pusat, Provinsi Kalimantan Timur tidak menjadi lokasi prioritas pada data sementara</p>		
		Agenda Pembangunan		Sasaran Visi		Arah Pembangunan Nasional			
		02 - Transformasi Ekonomi		01 - Pendapatan Per Kapita Setara Negara Maju		16 - Berketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan			
		Program	Kegiatan	KRO		RO			
		Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas	Perlindungan dan Penyediaan Lahan	Prasarana Pengembangan Kawasan		Lahan Pertanian Pangan Produktif			
		Catatan dan Tanggapan							
		Pemerintah Daerah		Kementerian Lembaga		Direktorat Sektor Bappenas			



**BAPPENAS**  
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/  
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

## NOTULENSI

### PERSIDANGAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (MUSRENBANGNAS) TAHUN 2024

#### PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

		<p>Bappeda Kaltim:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Untuk ketahanan pangan karena dekat dengan Ibu Kota Nusantara</li> <li>- Bulan April sudah ada pertemuan antara masyarakat dengan Camat, kesepakatan untuk dicetak baru (ekstensifikasi)</li> <li>- Bukan hanya pencetakan sawah, namun jalur airnya juga</li> <li>- Cetak sawah belum ada kajiannya, alangkah baiknya dari Kementan juga melakukan kajian</li> <li>- Kajian-kajian ini akan memperkuat, apakah Kaltim diperlukan dukungan untuk pemenuhan pangan/beras</li> <li>- Pada transformasi ekonomi, ada pengembangan produksi sentra terpadu (tercantum pada SEB Bappenas dan Kemendagri)</li> <li>- Istilah kajian bisa diganti dengan studi kelayakan, agar bisa dikerjakan Kementerian Pertanian, agar <i>inline</i></li> </ul> <p>Dinas Pertanian Kaltim:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Usulan Gapoktan</li> </ul>	<p>Kementerian Pertanian:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kegiatan ini tidak ada RO nya di tahun 2025</li> <li>- Perluasan areal tanam baru, seharusnya RO Lahan Pertanian Produktif</li> <li>- Fokusnya di optimasi lahan dan peningkatan produksi</li> <li>- Cetak sawah terkait direktif Presiden</li> <li>- Belum bisa diusulkan, bisa masuk ke ABTD 2025</li> <li>- Kajian bukan tuisi dari Kementan, melainkan BRIN</li> <li>- Dokumen usulan Presiden terpilih ada cetak sawah (sudah ada pembahasan)</li> <li>- Pembagiannya antara cetak sawah dan irigasi akan dibagi dengan Kementerian PUPR</li> <li>- Akan dilaksanakan <i>Tri lateral Meeting</i> dengan Bappenas</li> <li>- Tinggal menunggu ABTD 2025, apakah Kementan mendapatkan cetak sawah atau tidak</li> </ul>	<p>Dit. Pangan Pertanian:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Fokusnya tidak hanya satu, namun ada beberapa fokus (cetak sawah, irigasi, dan sebagainya)</li> <li>- Cetak sawah belum ada rumah RO</li> <li>- Ekstensifikasi masih dalam pembahasan</li> <li>- Sesuai dengan Presiden terpilih, untuk ekstensifikasi masih belum bisa direkomendasikan</li> <li>- Jalan usaha tani, sudah ada RO-nya di Renja (bisa masuk Jalan Usaha Tani)</li> <li>- Irigasi bisa masuk ke RO Irigasi Perpipaan</li> <li>- Ekstensifikasi ditolak</li> <li>- Jalan dan Irigasi bisa diarahkan ke DAK</li> <li>- Kajian bukan ada di Kementerian Pertanian</li> <li>- DAK saat ini masih pembahasan di level untuk penentuan tematik</li> <li>- Setelah penetapan tematik akan dilakukan penetapan menu</li> <li>- Setelahnya akan dilakukan <i>exercise</i> untuk daerah-daerah</li> <li>- Belum dapat dikonfirmasi untuk peluang bagi daerah-daerah di tahun 2025 (masih dalam proses dan dapat dikomunikasikan dengan Dit. PP terkait kebijakan DAK)</li> <li>- MM belum dilaksanakan</li> </ul>	
--	--	---	---	---	--



**BAPPENAS**  
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/  
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

## NOTULENSI

### PERSIDANGAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (MUSRENBANGNAS) TAHUN 2024

#### PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

		<ul style="list-style-type: none"><li>- Kondisi lahan yang berkurang karena alih fungsi lahan</li><li>- Perlu adanya perluasan areal tanam baru</li><li>- Tidak ingin gegabah, ingin bersama-sama dengan PUPR, BWS, Dinas Pangan, dan sebagainya</li><li>- Ingin ada studi secara ekonomi, teknis, dan sebagainya</li><li>- Perlu ada bantuan dari pemerintah</li><li>- Pada Gapoktan, sudah disampaikan terkait kelayakannya</li><li>- Sudah ada dokumentasi lokasinya melalui foto udara</li><li>- Akan dilakukan pertemuan kedua dengan Kementerian ATR/BPN</li></ul>		<ul style="list-style-type: none"><li>- Saat ini Februari atau Maret sudah ada pembahasan antara OIKN, Dit. PP dengan Kementan terkait isu pertanian di wilayah IKN dan sekitarnya</li><li>- Bisa dilibatkan kabupaten di sekitar IKN terkait rencana pengembangan</li><li>- Terkait asta cita pada cetak sawah masih berproses untuk penentuan lokasinya (belum ada lokasi spesifik)</li><li>- Sudah ada beberapa provinsi yang menjadi prioritas dalam asta cita</li><li>- Sudah ada lokpri di asta cita (Kalim tidak masuk ke dalam lokpri untuk cetak sawah)</li><li>- RKP, Renja K/L masih berproses</li><li>- RO belum ada yang menyebutkan secara spesifik</li></ul> <p>Dit. Regional II:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Potensi DAK untuk usulan terkait seperti apa</li><li>- Jika masuk ke dalam <i>statement</i> RKP, maka harus dikomunikasikan dengan Dit. PP</li><li>- Perlu di-<i>endorse</i> karena bersebelahan dengan IKN (dalam Trilateral Meeting)</li></ul>	
--	--	--	--	---	--

**NOTULENSI**  
**PERSIDANGAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (MUSRENBANGNAS) TAHUN 2024**

**PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

						Pimpinan Sidang 2, Direktur Lingkungan Hidup: - Bisa ada peluang jika sudah ada kajian			
No	Usulan	Volume		Satuan	Lokasi Kab/Kota	Kementerian/Lembaga	Hasil Kesepakatan		
		Usulan	Kesepakatan						
19	22 - Pembangunan SPAM Sistem Sungai Mahakam	1	0	Unit	Kab. Kutai Kartanegara, Kota Samarinda	Kementerian PUPR	<p style="text-align: center;"><b>Ditolak</b></p> Perlu dipastikan air baku dan nomenklatur kegiatannya harus jelas, apakah Kota Balikpapan saja atau Regional. Apabila sudah jelas mekanisme pembiayaannya seperti apa, APBN atau KPBU serta RCharus dipenuhi		
		Agenda Pembangunan		Sasaran Visi		Arah Pembangunan Nasional			
		02 - Transformasi Ekonomi		01 - Pendapatan Per Kapita Setara Negara Maju		16 - Berketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan			
		Program	Kegiatan		KRO			RO	
		Catatan dan Tanggapan							
		Pemerintah Daerah		Kementerian Lembaga		Direktorat Sektor Bappenas			
		Bappeda Kaltim: - Sudah dilakukan kajian awal oleh BWS terkait pengambilan air baku dari Sungai Mahakam - FS sudah ada, ED dari BWS - Pemprov juga siap untuk berkontribusi		Kementerian PUPR, BPIW: - RPIW sudah dilakukan kajian - Untuk peningkatan SPAM Teritip – Intake Mahakam belum ada kajian dan kebutuhan lebih lanjut  Kementerian PUPR, Cipta Karya:		Dit. Perumahan dan Permukiman: - Bisa diinformasikan apakah FS-nya untuk Balikpapan atau Samarinda dan Kutai Kartanegara - RO diubah menjadi Pembangunan SPAM Pembangunan Kota			



**BAPPENAS**  
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/  
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

## NOTULENSI

### PERSIDANGAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (MUSRENBANGNAS) TAHUN 2024

#### PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

	<ul style="list-style-type: none"><li>- Yang membutuhkan Balikpapan, namun Samarinda dan Kutai Kartanegara juga butuh</li><li>- Difokuskan pada Balikpapan</li><li>- Bendungan Sepaku Semoi belum ada kejelasan untuk pemenuhan Balikpapan</li><li>- Pada dasarnya bagaimana menyubstitusi Sepaku Semoi yang awalnya untuk Balikpapan</li><li>- Dokumen belum bisa disampaikan, namun diskusi dengan BWS ada rencana akan melaksanakan studi pada tahun 2024</li><li>- Opsi pertama SPAM Regional ataupun hanya menyediakan air baku</li><li>- Memasang perpipaan dari Mahakam sampai ke Waduk Manggar yang menjadi bahan baku</li><li>- SPAM-nya akan dibangun masing-masing Pemda</li><li>- Air baku dari Sungai Mahakam penyaringannya dengan kapasitas 5.000 L/det, melewati lahan yang ada di jalan tol</li><li>- Jalan tol sebagian besar masuk ke dalam wilayah IKN</li><li>- Selain Balikpapan, untuk kemudian hari bisa dimanfaatkan oleh IKN</li><li>- Samboja dan sekitarnya tidak lagi menjadi wilayah Kutai Kartanegara,</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Informasi yang disampaikan pelayanannya untuk SPAM Regional Kukar dan Samarinda, sedangkan yang dikonfirmasi adalah Balikpapan</li><li>- Jika yang disampaikan Balikpapan, bukan SPAM Regional melainkan IKK</li><li>- Pernah ada pembangunan IPA Teritip</li><li>- SPAM Sepaku Semoi diprioritaskan ke IKN, belum ada perluasan ke Balikpapan</li><li>- Jika sudah selesai pelaksanaan pembangunan ke IKN, bisa saja dilakukan ke Balikpapan</li><li>- Hingga saat ini belum ada informasi terkait usulan ini</li><li>- DED dan FS belum diinformasikan kepada CK</li><li>- Perlu dikonfirmasi juga kelembagaannya apakah sudah ada atau baru dibentuk</li><li>- Balikpapan sudah dibangun IPA Teritip, berdasarkan data ada <i>idle</i> yang belum digunakan</li><li>- Jika kebutuhan mendesak, air bakunya bersumber dari mana</li><li>- Jika dari Sepaku Semoi, jaraknya cukup jauh dari Balikpapan</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Untuk Kota Balikpapan apabila RC yang menjadi syarat sudah dipenuhi, akan didorong</li><li>- Sepaku Semoi ada 500 L/det yang diminta untuk Balikpapan</li></ul>	
--	---	---	---	--



**BAPPENAS**  
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/  
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

## NOTULENSI

### PERSIDANGAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (MUSRENBANGNAS) TAHUN 2024

#### PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

	<p>sehingga perlu ada intervensi dari pusat terkait wilayah tersebut</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Kebutuhan air minum Kota Bontang, hingga hari ini belum ada kejelasan pembangunannya (terkait permasalahan pada Bendungan Marangkayu)</li></ul> <p>Bappedalitbang Kota Balikpapan:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Balikpapan sudah krisis air</li><li>- <i>Idle</i> Teritip, hampir semua IPA tidak ada <i>idle</i></li><li>- Pelayanan yang dilayani PDAM sudah hampir 60% tidak bisa dilayani selama 24 jam</li><li>- Salah satu kendalanya adalah sumber air yang kurang</li><li>- Dari sisi kebutuhan, dari Sepaku Semoi juga sudah tidak mencukupi</li><li>- Dengan adanya IKN, yang di-<i>compare</i> dengan sampah yang masuk ke TPA jauh dengan timbunan dari jumlah penduduk</li><li>- Konsekuensi daerah transit untuk IKN, penduduk Balikpapan dari timbunan sampah 700 ribu sudah mencapai 850 ribu</li><li>- Air sudah sangat mendesak, PDAM sudah mulai kewalahan dengan melakukan pengeboran</li><li>- Jika Balikpapan sendiri yang menanggung cukup berat</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Jika ingin memanfaatkan Mahakam, apakah sudah ada perjanjian dengan Samarinda</li><li>- Apakah sudah diproses oleh BWS setempat, RC yang disiapkan oleh Pemda</li><li>- RC jika sudah tersedia, bisa dikoordinasikan dengan BWS</li><li>- Dari selaras, RC-nya belum ada</li><li>- Informasi terkait usulan ini masih minim</li><li>- Diselesaikan studi dari BWS dan dipastikan air bakunya dari BWS</li><li>- Metode seperti apa, apakah KPBU dan sebagainya</li><li>- Pembangunan SPAM untuk Kab. Kutai Kartanegara dan Bontang (dananya melalui <i>loan</i>)</li></ul>		
--	---	--	--	--

**NOTULENSI**  
**PERSIDANGAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (MUSRENBANGNAS) TAHUN 2024**

**PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kota Balikpapan sudah menginisiasi PKS</li> <li>- Sepaku Semoi sudah diskenarioan pembiayaan melalui KPBU</li> <li>- Diperlukan solusi untuk defisit air di Balikpapan</li> <li>- BWS rencananya akan menyusun studi di tahun 2024</li> </ul>							
No	Usulan	Volume		Satuan	Lokasi Kab/Kota	Kementerian/Lembaga	Hasil Kesepakatan		
		Usulan	Kesepakatan						
20	23 Pembangunan Bendung Regulator Telake	1	1	Unit	Kab. Paser	Kementerian PUPR	<b>Diakomodir</b> Dengan catatan tahun 2025 dilakukan tahapan pembebasan lahan		
		Agenda Pembangunan		Sasaran Visi		Arah Pembangunan Nasional			
		02 - Transformasi Ekonomi		01 - Pendapatan Per Kapita Setara Negara Maju		16 - Berketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan			
		Program	Kegiatan	KRO		RO			
		Catatan dan Tanggapan							
		Pemerintah Daerah		Kementerian Lembaga		Direktorat Sektor Bappenas			
		Bappeda Kaltim: - Tahun 2021 sudah dialokasikan untuk pembebasan lahan dan jaringan irigasi serta bendung regulatornya		Kementerian PUPR, BPIW: - RPIW diluar kawasan prioritas - Program-program sebelumnya telah dilakukan oleh BWS di Telake, apakah program yang sama atau ada detail informasi pekerjaan apa		-			

**NOTULENSI**  
**PERSIDANGAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (MUSRENBANGNAS) TAHUN 2024**

**PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Terdapat lahan sawah 21.000 lahan baku</li> <li>- Produktivitas sawah diharapkan meningkat</li> <li>- Studi apa yang dibutuhkan untuk Sungai Ampal Balikpapan</li> <li>- Sepakat perlu ada penahapan pembebasan lalu konstruksi</li> </ul>	<p>yang di mohonkan untuk dialokasikan</p> <p>Kementerian PUPR, SDA:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Menjadi bagian dari <i>project</i> rehabilitasi irigasi Telake, 1 RO di Kab. Paser dan Kab. PPU</li> <li>- Akan dimulai pada tahun 2027</li> <li>- Masih dilakukan <i>review design</i></li> <li>- Tahun 2025 dan 2026 rencananya akan dilakukan pembebasan lahan</li> <li>- Tahun 2027 akan dilakukan pembebasan lahan juga di beberapa titik</li> </ul>		
--	---	---	--	--

**3. REKAPITULASI**

HASIL KESEPAKATAN	TOTAL USULAN BERDASARKAN HASIL KESEPAKATAN
Diakomodir	<b>17</b>
Ditolak	<b>7</b>
Tidak Terbahas	<b>0</b>